

RANCANGAN AWAL RENJA

DINAS SOSIAL

KABUPATEN TANJUNG JABUNG

BARAT

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

Tahun Anggaran 2022

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT**

JL. KAPT. PIERRE TENDEAN – KUALA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, yang mana Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 adalah merupakan salah satu unsur teknis Penunjang Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang Sosial, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perubahan Tahun 2022 ini merupakan perwujudan komitmen penyelenggaraan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) serta untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta aspirasi masyarakat, dari aspirasi masyarakat maka diharapkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan perencanaan pembangunan yang partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga penyelenggaraan pembangunan dalam bentuk Otonomi Daerah dapat mempunyai keleluasan dan kesempatan serta kemandirian dalam menggali segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyusun Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal, Oktober 2021

KEPALA DINAS

Drs. SARIFUDIN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630915 199203 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2020 DAN PREDIKSI TAHUN 2021	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020.....	7
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial	9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1 Tela'ahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Sosial Kab.Tanjung Jabung barat	21

	3.3 Program dan kegiatan	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V	PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perubahan dari kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Sebelumnya yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sepenuhnya akan mendukung Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskini serta Bagian Sekretariat. Dalam menjalankan peran strategisnya ini OPD berpedoman kepada Rencana Strategis.

Dalam pelaksanaannya Renstra OPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang merupakan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja-OPD disusun berpedoman pada RPJMD, dan Renstra OPD dalam hal ini adalah RPJMD tahun (2021-2026) sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih

Kegiatan-kegiatan pada Rencana Kerja OPD akan berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra OPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial mengemban tugas dan tanggung jawab Permasalahan Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat teratasi

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2022, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Renja OPD mengacu kepada RKPD yang telah dibuat, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara parallel dan sifatnya saling memberi masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016

Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 61).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur bidang Sosial yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan yaitu :

1. Memberikan gambaran PMKS yang ada di Tanjung Jabung Barat
2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
3. Sebagai titik awal dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah untuk memberikan arah rencana Kegiatan untuk satu Tahun kedepan, sehingga pelaksanaan pembangunan bersinergis antara sektor dan sub sektor lainnya, guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah maka tujuan Ranwal Renja ini adalah :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Memberikan pedoman, alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022
3. Sebagai paduan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 disusun sebagai Berikut

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2021 DAN PREDIKSI TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2021 DAN PREDIKSI TAHUN 2022**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 berjalan sesuai yang diharapkan yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara maksimal bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu terhadap Realisasi Renstra SKPD dapat digambarkan pada penjelasan dibawah ini, dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun 2021 Sebagai Berikut :

**Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2021**

	Program/Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi	Keu %	Fisik %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,731,346,042	1,038,912,642	93	93
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113,037,650	104,858,785	92.76	99.38
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113,037,650	104,858,785	92.76	99.38
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,617,823,194	2,417,038,721	92,33	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,518,533,194	2,322,748,721	92,23	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99,290,000	94,290,000	94,96	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46,647,000	46,601,500	99.90	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46,647,000	46,601,500	99.90	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466,133,893	439.739.000	94,34	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,878,787	2,878,450	99.99	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,874,106	61,343,550	94.56	95.61
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,700,000	3,500,000	17.77	17.77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,893,000	32,785,000	88.87	88.82

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,300,000	4,085,000	64.84	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335,488,000	335,147,000	99.9	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,690,000	96.173.299	83,85	83,85
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,290,000	4,270,000	99.53	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,600,000	27,103,299	59.44	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64,800,000	64,800,000	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373,014,305	209.403.646	56,14	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,649,325	111,541,412	82.84	90.17
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,900,000	26,995,000	93.41	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209,464,980	209,403,646	99.97	100
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	163,482,788	122.574.725	74,98	99
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	16,642,210	16,642,210	100	100
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	16,642,210	16,642,210	100	100
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	146,840,578	105.932.515	72,14	99
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	72,626,225	70,647,250	97.28	100
	Pemberian Layanan Rujukan	72,439,353	33,510,265	46.26	96.82
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1,775,000	1,775,000	100	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4,018,754,331	3,763,176,974	93,64	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4,018,754,331	3,763,176,974	93,64	100
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	169,994,124	166,148,610	98.06	98.74
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	169,443,610	146,794,124	86.35	99.82
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3,679,316,597	3,450,234,240	93.77	99.94
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	120,324,450	113,361,850	94,21	99,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	120,324,450	113,361,850	94,21	99,00
	Penyediaan Makanan	120,324,450	113,361,850	94.21	99.00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	52,839,196	50,589,196	95,74	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	52,839,196	50,589,196	95,74	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	52,839,196	50,589,196	95.74	100
	TOTAL DANA	8,086,746,807	7,502,054,108	92,77	98,20

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Kinerja Dinas Sosial pada Tahun 2021 secara keseluruhan sudah mencapai target fisik sebesar 98,20 % dengan daya serap keuangan sebesar Rp.1.670.319.648,- atau 92,77%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Bidang Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal Kesejahteraan Sosial dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kewenangan otonomi daerah yang sesuai tugas desentralisasi seperti Memberikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pelayanan Psikososial bagi PMKS ditrauma centre termasuk bagi Korban Bencana, Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Napak Tilas serta potensi pemanfaatannya secara luas.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki multi permasalahan Sosial yakni adanya 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) serta berbagai macam bencana alam dan Sosial yang sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan harus segera mendapatkan penanganan sebagai wujud perhatian pemerintah daerah untuk itu perlu dukungan dana dari Pemerintah Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dari Renja yang telah disusun pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indicator Kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Sosia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu, dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran , kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung arah kebijakan, telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun dalam pelaksanaanya didukung pula dengan beberapa program dan Kegiatan yang sesuai dengan permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2020

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa Program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk menunjang program-program diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa rencana kegiatan/sub kegiatan untuk Tahun 2022 yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
8. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- Pemberian Layanan Rujukan
9. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
10. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyediaan Makanan
11. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tabel : 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
Dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2020
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Th. 2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9 = (4 +6+8)	10=9/4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,36%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,79%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,26%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi keuangan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	96,11%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,93%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98,02%	12 Bulan	36 Bulan	60%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 20	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9 = (4 +6+8)	10=9/3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	95,30%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,39%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya media cetak/elektronik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya/tersedianya makan dan minum rapat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,95%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Media Cetak/Elektronik	tersedianya media cetak dan elektronik dan iklan layanan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98,75%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	95,57%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung aula/Kantor	1 Paket	-	-	-	-		-	
Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	terlaksananya pengawasann pembangunan gedung kantor	1 Paket	-	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realis-asi Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor	terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor	1 Paket	-	-	-	-	-	-	
Pengecoran Rabat beton Halaman Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana dan prasarana aparatur	1 Paket	-	-	-	-	-	-	
Perencanaan Pengecoran Rabat beton Halaman Kantor	Terlaksananya perencanaan pengecoran rabat beton halaman kantor	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Pengawasan Pengecoran Rabat beton Halaman Kantor	Terlaksananya pengawasan pengecoran rabat beton halaman kantor	1 Paket	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	
Pengadaan kendaraan dinas operasional	tersedianya kendaraan dinas operasional	9 Unit	-	-	-	3 unit	3 Unit	33%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	50 Unit	-	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	110 Unit	73%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	50	-	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	30 Init	73%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional dinas	100%	-	12 Bulan	12 Bulan	90,01%	12 Bulan	36 bulan	60 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	-	12 bulan	12 bulan	92,49%	12 bulan	36 bulan	60 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor	100%	-	3 Bulan	3 Bulan	100%	3 Bulan	36 bulan	60 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan Kinerja aparatur	100%	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 bulan	60 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 bulan	60 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan PNS	10 Orang	-						
Pengembangan SDM	Meningkatnya Pengetahuan dan kinerja aparatur	8 Orang	-	6 orang	6 orang	96,38	6 orang	6 orang	25%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	32 Orang	-	6 Orang	6 Orang	96,38	6 Orang	6 orang	25 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem manajemen pelaporan kinerja dan Keuangan	100%	-						
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	25 Dokumen	5	5	5	100%	5	15	60 %
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang menerima bantuan	80%							
Pendataan dan Pelaporan PMKS	Tersedianya data dan Profil PMKS	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	25%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2016	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
Pendataan fasilitas UEP bagi keluarga miskin	tersedianya data UEP Keluarga Miskin yang berham mendapat bantuan	28 Dokumen	-	7 Kec	7 Kec	77,50	7	7	25%
Penyuluhan Bahaya Narkoba berbasis Sekolah	Pelajar mengetahui Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	100 Siswa		2 Kec	2 Kec	92,70	100 Siswa	100 Siswa	25 %
Pembinaan dan Monitoring Bansos Rastra dan BPNT	Pendistribusian/Penyaluran Bansos Rastra sampai tujuan dan tepat sasaran	52 Kec	-						
Kesiapsiagaan Bencana dan Pemeliharaan Bufferstock Barang Bencana	Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	75 Kali Kejadian Bencana			-	99,26		15	40%
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan	Meningkatnya peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat	20.000 KPM		13 Kec	13 Kec	96,48	6090 KPM	6090 KPM	30,45%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	80%	-						
optimalisasi peran dan fungsi karang taruna	Meningkatnya kemampuan manajemen Karang taruna	13	-	-	-	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
Penguatan Kelembagaan Komisi Daerah Lanjut Usia	Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Lansia	65 Kec	-	13 Kec	13 Kec-	83,27%	13 Kec	26 Kec	40%
Evaluasi dan Monitoring Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya pemantauan bantuan pemberdayaan sosial	52 Kec	-				-	13 kec	25 %
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan	Terpeliharanya TMP Yudha Satria dengan baik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,57%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legun Veteran RI	Meningkatnya kinerja legiium Veteran di Tanjab Barat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	67,22%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan	Terlaksananya Kegiatan Upacara Hari Pahlawan	5 Kali Kegiatan	1 kali kegiatan	1 Kali	1 Kali	99,82%	1 Kali	2 Kali	60%
Verifikasi dan validasi data Terpadu Penanganan Fakir Miskin	Terlaksananya verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin	4 Kali Kegiatan	--	1 Kali Kegiatn	1 Kali egiatan	99,98%	-	1 Kali Kegiatan	25%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah PMKS	8%	-						

Santunan Pemulangan Tuna Sosial	Terlaksananya santunan, pengobatan dan pemulangan tuna sosial	205 orang	20 org	35 Org	35 Org	70,98	40 Org	40 Org	46 %
Operasi Terpadu Tuna Sosial	Masyarakat peduli dan ikut serta dalam pencegahan dan penanganan tuna susila, gepeng dan anak jalanan	45 Org	-				-	-	
Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma		35%	-						
Pembuatan aksesibilitas bagi difabel/ penyandang cacat	Terbangunnya aksesibilitas bagi difabel/penyandang cacat	100%	-				-	1 Paket	100%

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tela'ah Terhadap Kebijakan Nasional

Terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan satu kesatuan dalam membantu tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2025 yaitu :

“ MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH “

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi, konsultasi, pengawasan dan pelayanan secara umum kepada para pemangku kepentingan;
2. Menciptakan pola pikir aparatur sesuai jabatannya dengan tupoksi dibidangnya;
3. Membentuk aparatur yang berkinerja tinggi sesuai kebutuhan masyarakat;
4. melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan baik secara vertical maupun horizontal.

Tujuan ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan dari organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menerapkan prinsip Good Governance dilingkungan Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peningkatan pelayanan yang mendasar harus diperbaiki, agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan menumbuhkan sikap akuntabel, maka harus ditunjang dengan sistem administrasi dan pemerintahan yang baik, sarana dan prasarana yang cukup, wawasan serta pengetahuan aparat yang luas serta regulasi peraturan yang mampu mempercepat pembangunan. Pada akhirnya keseluruhan tujuan dari organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada satu tahun kedepan dapat tercapai.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan yang efektif dan efisien;
2. Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/teknis perkantoran;
3. Terpenuhinya Sarana Prasarana Perkantoran;
4. Tersedianya Sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Tersusunnya laporan pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan;
6. Terwujudnya tertib administrasi manajemen Asset Daerah;
7. Melaksanakan pemerataan pelayanan disemua kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menyesuaikan program kegiatan
8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah sosial.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya :

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pemberdayaan Sosial
9. Program Rehabilitasi Sosial
10. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

11. Program Penanganan Bencana
12. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk menunjang program-program diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa rencana kegiatan/sub kegiatan untuk Tahun 2022 yaitu :

12. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
14. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 18. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 19. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Rujukan
 20. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 21. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 22. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya :

13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15. Program Pemberdayaan Sosial
16. Program Rehabilitasi Sosial
17. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
18. Program Penanganan Bencana
19. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk menunjang program-program diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa rencana kegiatan/sub kegiatan untuk Tahun 2022 yaitu :

23. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
25. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
26. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
29. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
30. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- Pemberian Layanan Rujukan
31. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 32. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
- 33. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel : 4 terlampir :

Tabel 4
Rancangan Awal Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Rp
3	4	5	6	9	10		11	12	
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3,461,679,843			4,923,499,980	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB KOTA				3,213,522,931			4,108,499,980	
1.06.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				52,187,100	DAU		50,000,000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen :	Dinsos		52,187,100	DAU	22 dok	50,000,000	
		- Renstra		1 Dok					
		- Renja		1 Dok					
		- DPA		1 Dok					
		- Evaluasi Renstra		1 Dok					
		- Evaluasi Renja		1 Dok					
		- Lakip	1 Dok						
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,730,686,478	DAU		2,720,000,000	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ tunjangan	Dnsos	20 orang	2,627,246,478	DAU	12 bulan	2,600,000,000	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Honorarium		14 orang	103,440,000	DAU	12 bulan	120,000,000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				247,969,373	DAU		990,500,000	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor		12 bulan	2,878,799	DAU	12 bulan	4,000,000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	44,757,024	DAU	12 bulan	120,000,000	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		1300 kotak	4,800,000	DAU		24,000,000	

1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		6 item	16,900,000	DAU		65 buah, 70000 lembar	35,000,000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-undangan		2500 eks	6,300,000	DAU		2500 eks	7,500,000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi		400 paket	172,333,550	DAU		400 paket	800,000,000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107,600,000	DAU			132,000,000
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkelola		286 buah	2,000,000	DAU		200 lembar	2,000,000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Beban Pemakaian Air, Jumlah Beban Pemakaian Listrik		12 bulan	45,600,000	DAU		12 bulan	50,000,000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	jumlah layanan umum kantor		12 bulan	60,000,000	DAU		12 bulan	80,000,000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75,079,980	DAU			215,999,980
1.06.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perisinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional		17 Unit	52,350,000	DAU		17 Unit	180,000,000
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya		47 unit	13,730,000	DAU		47 unit	27,000,000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya		2 unit	8,999,980	DAU		pakket	8,999,980
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				56,347,400			-	85,000,000
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Tersedianya PSKS yang terampil dan memadai dalam memberikan pelayanan			56,347,400				85,000,000
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/kota	Jumlah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina		13 org	56,347,400	DAU		13 org	85,000,000
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan layanan potensi sumber kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan			54,742,188	DAU		-	175,000,000
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarat, Anak Terlarat, Lanjut Usia Terlarat, serta Gelandangan, Pengemis di luar Panti Sosial	Cakupan layanan potensi sumber kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			16,642,210			-	100,000,000

04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Bimbingan Sosial Bagi Keluarga /Pendamping Penyandang PPKS		2 Kali	16,642,210	DAU		2 Kali	100,000,000
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial				38,099,978			-	75,000,000
04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Terlayannya PPKS terlantar (13 Kecamatan)		150 org	38,099,978	DAU		120 org	75,000,000
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar			49,829,810				135,000,000
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				49,829,810	DAU			135,000,000
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pembinaan, Sosialisasi dan pemantapan bagi SDM PKH	2 kali	56 SDM PKH	49,829,810	DAU		56 SDM PKH 2 Kali	135,000,000
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	34,340,350				70,000,000
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan			34,340,350			-	70,000,000
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	jumlah penerima buffer stock Makanan korban bencana		35 KK	34,340,350	DAU		40 KK	70,000,000
07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yg dikelola		1 TMP	52,897,164			-	350,000,000
07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di pelihara		1 TMP	52,897,164				350,000,000
07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Satria Pengabuan		6 Pusaran	52,897,164	DAU		10 Pusaran	350,000,000

Kuala Tungkal, Oktober 2021

KEPALA DINAS

Drs. SARIFUDIN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630915 199203 1 008

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Bidang Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang harus diwujudkan. Selain hal tersebut diatas, juga mempertimbangkan bahwa terwujudnya aparatur yang professional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan aparatur yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana agenda reformasi birokrasi pada periode pembangunan aparatur yang belum dituntaskan.

Kuala Tungkal, Oktober 2021

KEPALA DINAS

Drs. SARIFUDIN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630915 199203 1 008